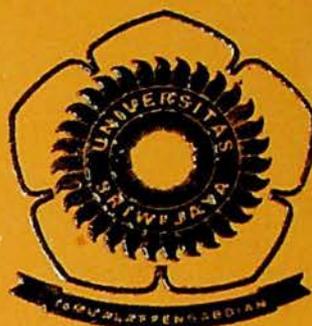


**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG**



Skripsi oleh:

NYAYU SITI HAWA FRANSISCA

NIM: 01071003038

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
TAHUN 2012**

S
336.2407
Apa
a
2012

R 245A / 24704

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG**



Skripsi oleh:

NYAYU SITI HAWA FRANSISCA

NIM: 01071003038

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
TAHUN 2012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

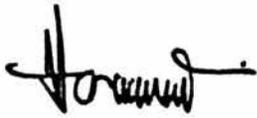
NAMA : NYAYU SITI HAWA FRANSISCA
NIM : 01071003038
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 6 Februari 2012


Ketua : Drs. H. Harun Delamat, M.si, Ak
NIP 195501131990031002

Tanggal 6 Februari 2012


Anggota : Ahmad Subeki, SE, MM, Ak
NIP 196508161995121001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : NYAYU SITI HAWA FRANSISCA
NIM : 01071003038
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

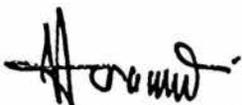
Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 1 Februari 2012 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 6 Februari 2012

Ketua

Anggota

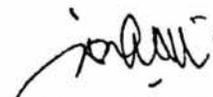
Anggota



Drs. H. Harun Delamat, M.si, Ak
NIP.195501131990031002

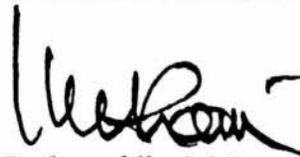


Hj. Rochmawati Daud, SE, M.si, Ak
NIP.196409031994032001



Mukhtaruddin, SE, M.si, Ak
NIP.196712101994021001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak
NIP.195808281988101001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Nyayu Siti Hawa Fransisca

Nim : 01071003038

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Pembimbing

Ketua : Drs. H. Harun Delamat, M.si, Ak

Anggota : Ahmad Subeki, SE, MM, Ak

Tanggal diuji : 1 Februari 2012

Adalah benar-benar hasil karya saya dibawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Inderalaya, 6 Februari 2012

Yang memberi pernyataan,



Nyayu Siti Hawa Fransisca

NIM 01071003038

SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa :

Nama : Nyayu Siti Hawa Fransisca

Nim : 01071003038

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

telah kami periksa cara penulisan, *grammer*, maupun susunan *tense*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, 6 Februari 2012

Pembimbing Skripsi

Ketua,



Drs. H. Harun Delamat, SE, M.Si, Ak

NIP.195501131990031002

Anggota,



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak

NIP.196508161995121001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan (QS Al-Insyirah : 6)
- Bila kegagalan bagaikan hujan, dan keberhasilan bagaikan matahari, maka butuh keduanya untuk melihat pelangi.

Kupersembahkan kepada:

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Kakak – kakak ku**
- **Almāmaterku dan sahabat yang kuhormati**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengangkat judul **Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang**. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Gambaran Umum KPP Madya Palembang, Bab IV Analisis dan Pembahasan, Bab V Bab V Kesimpulan dan Saran.

Hasil penelitian menunjukkan selama tahun 2007-2010 tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan masih kurang baik. Jika dilihat dari segi penyampaian SPT persentase yang di dapat cenderung menurun pada tahun 2007 – 2009 akan tetapi pada tahun 2010 terjadi kenaikan yang signifikan. Dilihat dari segi jumlah kasus tunggakan yang terjadi mengalami peningkatan dari tahun 2007 – 2010 menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi masih sangat tinggi. Sedangkan angka pemeriksaan yang terus meningkat dari tahun ketahunnya mencerminkan masih tingginya tingkat ketidak patuhan Wajib Pajak badan di KPP Madya Palembang.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Namun, berkat bimbingan dan nasehat yang diberikan oleh Bapak/Ibu dosen, keluarga, dan teman-teman, maka skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

Palembang, Februari 2012

Nyayu Siti Hawa Fransisca

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang”**, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsurijal, AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Hj. Relasari, SE, M.Si, Ak, Pembimbing Akademik.
5. Bapak Drs. H. Harun Delamat, M.Si, Ak, Ketua Pembimbing skripsi yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, inspirasi, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Subeki, SE, MM, AK, Anggota Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua staf dan pegawai Fakultas Ekonomi Sriwijaya
8. Kepala dan Staf Pegawai KPP Madya Palembang, atas bimbingan dan bantuan data yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini
9. Kedua Orangtua saya khususnya ibu saya, terima kasih telah memberikan kasih sayang, doa dan semangat tiada henti. Terima kasih telah membimbing saya dari kecil hingga kini menjadi dewasa, semoga saya bisa selalu membanggakan kalian berdua.
10. Kedua kakak ku serta keluarga besar ku, terima kasih atas segala dukungan, dorongan, motivasi, segala perhatian dan doa yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman angkatan 2007, kakak tingkat dan adik tingkat di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, perhatian, dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan, sesama bimbingan skripsi yang saling memberikan informasi dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
13. Dan pihak-pihak lain yang baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT kepada kita, Amin.

Penulis,

Nyayu Siti Hawa Fransisca

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIAN UJIAN KOMPREHENSIF	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI / TIDAK PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAKSI.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.5.2. Data dan Metode Pegumpulan Data	5
1.5.3. Teknik Analisis Data.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Dasar-dasar Perpajakan.....	10
2.1.1. Pengertian Pajak.....	10
2.1.2. Fungsi Pajak.....	11
2.1.3. Pembagian Jenis Pajak	13
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	14
2.1.5. Cara Pemungutan Pajak	15
2.1.6. Asas Pemungutan Pajak	16
2.1.7. Perlawanan Terhadap Pajak	17
2.2. Surat Pemberitahuan (SPT)	18
2.2.1. Pengertian Surat Pemberitahuan.....	18
2.2.2. Fungsi SPT	19
2.2.3. Jenis SPT	21
2.2.4. Pengambilan SPT	22
2.2.5. Pengisian dan Penyampaian SPT	23
2.3. Wajib Pajak	24
2.3.1. Kewajiban Wajib Pajak	24
2.3.2. Hak – hak Wajib Pajak	26
2.3.3. Kepatuhan Wajib Pajak Badan	27
2.4. Pajak Penghasilan.....	28
2.4.1. Subjek Pajak Badan dan Non Subjek Pajak Badan	28
2.4.2. Objek Pph Badan dan Non Objek Pph Badan	32



BAB III GAMBARAN UMUM KPP MADYA PALEMBANG	
3.1. Sejarah Singkat Organisasi	36
3.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang	39
3.2.1. Visi Dari Direktorat Jendral Pajak	39
3.2.2. Misi Dari Direktorat Jendral Pajak	40
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Madya Palembang	40
3.4. Struktur Organisasi KPP Madya Palembang dan Pembagian Tugas	41
3.5. Wilayah Kerja	49
3.6. Wajib Pajak	50
3.7. Pelayanan	51
3.8. Data dan fakta Penelitian	52
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Madya Palembang Tahun 2007 Sampai dengan Tahun 2010	54
4.1.1. Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Palembang	54
4.1.2. Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT WP Badan Terhadap Jumlah Penerimaan PPh Badan pada KPP Madya Palembang.....	59
4.1.3. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penerbitan Surat Teguran, Surat Sita dan Surat Paksa	64
4.1.4. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Atas Pemeriksaan Pajak yang di lakukan KPP Madya Palembang	69
4.2. Upaya – upaya KPP Madya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Personalia KPP Madya Palembang	48
Tabel 3.2. Daftar Rekap Wajib Pajak KPP Madya Beserta Statusnya	50
Tabel 3.3. Data Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2007 - 2010	53
Tabel 3.4. Data Penerimaan PPh Badan KPP Madya Palembang Tahun 2007 – 2010	53
Tabel 3.5. Data Jumlah Surat Teguran, Surat Sita, dan Surat Paksa yang di keluarkan oleh KPP Madya Palembang tahun 2007 - 2010	53
Tabel 4.1. Tabel Peningkatan Wajib Pajak Badan Terdaftar di KPP Madya Palembang Tahun 2007 – 2010	55
Tabel 4.2. Persentase Perkembangan Penyampaian SPT Tahunan Badan di KPP Madya Palembang Tahun 2007 – 2010	56
Tabel 4.3. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Madya Palembang Tahun 2007 – 2010	59
Tabel 4.4. Penerimaan Pajak Dari wajib Pajak Hubungannya Dengan Jumlah SPT Tahunan yang Disampaikan dan Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Madya Palembang	60
Tabel 4.5. Perbandingan Perkembangan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian SPT Tahunan Dengan Penerimaan PPh Badan di KPP Madya Palembang	62
Tabel 4.6. Jumlah Surat Teguran, Surat Sita, dan Surat Paksa yang Dikeluarkan Oleh KPP Madya Palembang tahu 2007 – 2010	65
Tabel 4.7. persentase Jumlah penerbitan Surat Paksa di KPP Madya Palembang	66
Tabel 4.8. Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pencairan Tunggakan di KPP Madya Palembang Tahun 2007 -2010	68
Tabel 4.9. Persentase Perkembangan Pemeriksaan Pajak Yang Dilakukan Oleh KPP Madya selama 2007 - 2010	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KPP Madya Palembang	42
---	----

**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada
Kantor Pelayanan pajak Madya Palembang**

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar Pada KPP madya Palembang berdasarkan persyaratan wajib Pajak patuh seperti yang di maksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat di berikan pengembalian Pendahuluan kelebihan membayar Pajak. Serta upaya apa saja yang telah dilakukan KPP Madya Palembang dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terdaftar di KPP Madya. Dalam penelitian ini tingkat kepatuhan di analisis dari segi penyampaian SPT oleh Wajib Pajak Badan Terdaftar, dari jumlah kasus tunggakan oleh Wajib Pajak terdaftar, dan dari segi pemeriksaan pajak yang di laksanakan tahun 2007 sampai dengan 2010.

Hasil penelitian menunjukkan selama tahun 2007-2010 tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan masih kurang baik. Jika dilihat dari segi penyampaian SPT persentase yang di dapat cenderung menurun pada tahun 2007 – 2009 akan tetapi pada tahun 2010 terjadi kenaikan yang signifikan. Dilihat dari segi jumlah kasus tunggakan yang terjadi mengalami peningkatan dari tahun 2007 – 2010 menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi masih sangat tinggi. Sedangkan angka pemeriksaan yang terus meningkat dari tahun ketahunnya mencerminkan masih tingginya tingkat ketidak patuhan Wajib Pajak badan di KPP Madya Palembang

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak badan, SPT Tahunan PPh Badan, Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, Tunggakan Pajak

*Analysis Of The Tax Agency Obligation Compliance Levels in
KPP Madya Palembang*

Abstraction

This study aims to determine the extent of compliance with National Taxpayers are registered in the KPP Madya Palembang based tax as obedient as a mandatory requirement that the intention of the Minister of Finance Decree No. 544/KMK.04/2000 on criteria Taxpayers who can provide returns in excess Introduction pay taxes. And the efforts of what has been done in a KPP Madya Palembang improve taxpayer compliance rate registered in the KPP Madya Palembang. In this study analyzes the level of compliance in terms of delivery of SPT by the Board of Registered Taxpayers, of the number of cases registered arrears by the taxpayer, and in terms of tax examinations carried on from 2007 until 2010.

The results showed during the years 2007-2010 the level of the tax agency Obligation Compliance is still not good. In terms of percentage in SPT delivery may tend to decline in the year 2007 - 2009 but in 2010 a significant increase. Viewed in terms of number of cases occurring arrears have increased from year 2007 - 2010 showed that the number of violations occurred still very high. While the examination of the ever-increasing number of years reflecting the still high level of disobedience to the Taxpayer entities in KPP Madya Palembang.

Key words: The tax agency Obligation Compliance, SPT Annual Corporate Tax, Tax inspection, Warning letter, Forced Letter, Letter of confiscation, Tax Arrears

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN BAB I

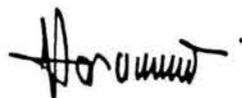
NAMA : NYAYU SITI HAWA FRANSISCA
NIM : 01071003038
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

PEMBIMBING SKRIPSI

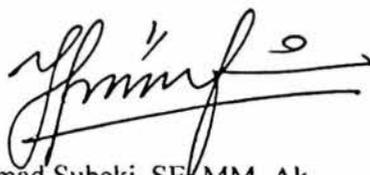
TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal Februari 2012

Ketua : 
: Drs. H. Harun Delamat, M.si, Ak
NIP 195501131990031002

Tanggal Februari 2012

Anggota : 
: Ahmad Subeki, SE, MM, Ak
NIP 196508161995121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpajakan merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal yang dinamis, penerapannya harus senantiasa mengikuti dinamika perekonomian, baik domestic (Rosdiana, dikutip dalam Harinurdin, 2009). Mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak (*budgetair* dan *regulerend*), maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, juga menggenjot penerimaan Negara. Oleh karena itu, setiap tahun dirjen pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana pembangunan (Rahayu, dikutip dalam Harinurdin, 2009).

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak itulah Indonesia menganut sistem *self assessment*. Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, dikutip dalam Mustikasari, 2007). Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio*. Menurut data Badan Kebijakan Fiskal, secara berturut-turut sejak 2004 hingga 2010, *tax ratio* tercatat 12,2 persen, 12,5 persen, 12,3 persen, 12,4 persen, 13,3 persen, 12,1 persen, dan 12,4 persen.

Dari gambaran sebelumnya, ada dua implikasi utama berkaitan dengan rendahnya *tax ratio*. Pertama, pada satu sisi mencerminkan rendahnya kepatuhan



wajib pajak (*tax compliance*) masyarakat sehingga jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan masih relative sedikit dibandingkan dengan basis pajak (*tax base*) yang ada. Kedua, relative rendahnya jumlah pajak yang di kumpulkan di banding dengan basis pajak yang ada juga memberikan harapan untuk peningkatan penerimaan pajak selanjutnya. Dengan kata lain, masih tersedia ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. (Gunadi, 2005).

Menurut Simon seperti yang dikutip oleh Gunadi (2005) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (*obstrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan Negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu, dikutip dalam Harinurdin, 2009)

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Nurmantu, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 30 April maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. Menurut Chaizi Nasucha,

2004, kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan fraud dan illegal yang disebut tax evasion, maupun penghindaran pajak tidak dengan fraud dan dilakukan secara legal yang disebut tax avoidance.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Madya kota Palembang. Penulis mengangkat permasalahan tersebut ke dalam tulisan dengan judul “ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB BADAN PADA KPP MADYA KGTA PALEMBANG”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dalam penelitian ini perumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Berapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Kota Palembang?
2. Apa saja upaya yang telah dilakukan KPP madya kota Palembang untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang ada di KPP Madya Kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan KPP madya kota Palembang untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang ada di KPP Madya Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan, antara lain:

1. Manfaat Bagi Akademis.

Dalam penulisan ilmiah ini dapat diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada mahasiswa tentang perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).

2. Manfaat Bagi Penulis.

Penulis dapat memberikan pengalaman baru, pengetahuan, serta aplikasi langsung di dalam memahami perpajakan khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak.

3. Manfaat Bagi Pembaca atau Masyarakat.

Dalam penulisan ilmiah ini dapat menambah pengetahuan tentang dunia perpajakan dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan analisa yang dibuat lebih terfokus pada masalah sehingga mencapai kesimpulan yang tepat, maka penulis membatasi permasalahannya yaitu:

1. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu di Kantor Pelayanan Madya Palembang.
2. Analisis data tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT tahunan di KPP Madya Palembang dengan menggunakan pengukuran kepatuhan seperti yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak SE-18/PJ/2006 yang ditetapkan tanggal 27 Juli 2006 tentang *Key Performance Indicator (KPI)* serta seberapa banyak surat teguran, surat paksa, dan surat sita yang di keluarkan oleh pihak KPP madya kota Palembang untuk melihat dan menganalisis pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Palembang.
3. Data yang akan diteliti hanya pada periode waktu 4 tahun yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

1.5.2. Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data
 - a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari KPP Madya Palembang atau langsung dari sumbernya yang belum diolah. Misalnya jumlah realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan selama 4 (empat) tahun (2007–2010) serta data mengenai gambaran umum KPP Madya Palembang.
 - b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga Penulis dapat langsung

menggunakannya, misalnya jumlah WP badan yang terdaftar, jumlah SPT yang disampaikan atau di terima, serta jumlah surat teguran, surat paksa maupun surat sita yang di keluarkan KPP Madya kepada wajib pajak badan yang terdaftar.

2. Jenis data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Kualitatif, adalah data yang berisikan mengenai kondisi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, misalnya informasi tentang gambaran umum KPP Madya Palembang.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka jumlah WP badan yang terdaftar, jumlah SPT yang disampaikan atau di terima, serta jumlah surat teguran, surat paksa maupun surat sita yang di keluarkan KPP Madya kepada wajib pajak badan yang terdaftar.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Pustaka

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka, yang menggunakan buku-buku referensi, yang dapat digunakan sebagai acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diambil dan untuk mempermudah pemahaman atas permasalahan melalui landasan teori yang digunakan.

b. Pengamatan Langsung

Metode ini dilakukan dengan pengambilan data di lapangan untuk memperoleh keterangan atau data yang dikehendaki. Cara pengumpulan data:

1). Teknik Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung kepada beberapa orang karyawan yang mewakili instansi untuk mendapatkan keterangan atau data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2). Teknik Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan mencatat, menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen yang sudah ada pada KPP Madya Palembang. pengumpulan data melalui internet, media cetak, majalah-majalah yang berhubungan dengan permasalahan.

1.5.3. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif, yaitu:

1. Teknik Analisa Deskriptif Kualitatif

Yaitu menggunakan catatan dan dokumen yang berbentuk uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik yang telah didokumentasikan oleh Pihak KPP Madya Palembang maupun yang penulis peroleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait.

2. Teknik Analisa Deskriptif Kuantitatif

Yaitu teknis analisis yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka, dan menganalisa data yang diambil berdasarkan sampel sehingga dapat dihitung untuk mendapatkan hasil. Data yang diperoleh akan dianalisis sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan rumus yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak, SE-18/PJ/2006 yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2006 tentang *Key Performance Indicator (KPI)* menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan

dalam satu periode. Rumus Perhitungannya adalah :

$$\begin{array}{l} \% \text{ Tingkat Kepatuhan WP Badan} \\ \text{Dalam Menyampaikan SPT Tahunan} \end{array} = \frac{\text{SPT tahunan PPh Badan}}{\text{WP Badan Terdaftar}} \times 100\%$$

Keterangan :

SPT Tahunan PPh : Untuk KPI semester ganjil, jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima semester ganjil tersebut, sedangkan untuk semester genap adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima selama satu tahun penuh

Wajib Pajak Terdaftar : Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan NPWP per awal tahun, termasuk WP Non Efektif.

Data yang telah diolah sesuai perhitungan diatas akan di analisis berdasarkan dengan melihat tren perkembangan dari persentase kepatuhan yang didapat dan analisis juga akan di lakukan terhadap efek dari naik turunnya persentase kepatuhan tersebut terhadap nilai penerimaan pajak pada KPP Madya Palembang dari tahun ke tahun yang diteliti.

b. Sesuai dengan persyaratan wajib pajak patuh sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pegembalian pendahuluan kelebihan pembayar pajak sebagaimana diubah Keputusan Menteri Keuangan nomor 253/KMK.03/2007. Yang mana kriteria wajib pajak patuh tidak dapat hanya di lihat dari segi penyampaian SPT akan tetapi salah satunya wajib pajak diharuskan tidak mempunyai tunggakan dalam semua jenis pajak. Untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Palembang dari segi

tuggakan yg ada, maka penulis menggunakan data jumlah surat paksa, surat sita, dan surat teguran yang di keluarkan KPP Madya terhadap Wajib Pajaknya serta realisasinya. Data ini akan di hitung persentasenya baik terhadap SPT yang diterima oleh KPP Madya maupun jumlah realisasinya terhadap penerimaan pertahun.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN BAB II

NAMA : NYAYU SITI HAWA FRANSISCA
NIM : 01071003038
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal Februari 2012

Ketua : 
: Drs. H. Harun Delamat, M.si, Ak
NIP 195501131990031002

Tanggal Februari 2012

Anggota : 
: Ahmad Subeki, SE, MM, Ak
NIP 196508161995121001

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Said Kelana dan Chandra. 2006. *Metodologi Penelitian Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gunadi (2005). *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*. Jurnal Perpajakan Indonesia, Februari 2005 hal 4-9.
- Harinurdin, Erwin. 2009. *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei - Agustus 2009 hal. 96-104
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu*. Edisi Kesembilanbelas. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Edisi Kesembilanbelas. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Marsyahrul, Tony, 2006. *Pengantar Perpajakan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar 26-28 Juli 2007
- Resmi, siti, 2007. *Perpajakan teori dan kasus*, Jakarta , salemba empat
- Sofa. 2008. *Pengertian Administrasi Perpajakan, kepatuhan, dan Pajak Internasional*, Artikel Online. Diakses tanggal 21 Maret 2011.
<http://www.wordpress.com/2008/02/05/pengertianadministrasiperpajakan>
- Sugiarto, Dermawan. 2010. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kondisi Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak*. Artikel Online. Di akses tanggal 21 Maret 2011.
<http://akuntanngblog.blogspot.com/2010/03/penelitian-kepatuhan-pajak-badan.html>
- Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi FE UNSRI. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Unsri*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia Edisi 2007*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Wijoyanti, Mayang. 2010. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Yadi, Asral. 2009. *Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Terhadap Jumlah Penerimaan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. Skripsi. Universitas Sriwijaya. Palembang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 16, Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.